

DAERAH - PAJAK  
2010

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NO.3 , LD.2010/NO.39. TLD NO. 39.HLM. 33

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

- bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Qanun Kabupaten Aceh Tengah yang mengatur pajak daerah di Kabupaten Aceh Tengah perlu dilakukan pengaturan dan Penyesuaian kembali Pengaturan tentang pajak daerah;
- Dasar Hukum Qanun ini adalah Dasar Hukum Qanun ini adalah UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1981; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 224 Tahun 1997; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 136 Tahun 2000; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2007; Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 12 Tahun 2008
- Dalam Qanun ini diatur tentang ketentuan umum; jenis pajak, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; pemungutan pajak, pembayaran dan penagihan pajak; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; keberatan dan banding; pengembalian kelebihan pembayaran; kadaluarsa penagihan; pembukuan dan pemeriksaan; insentif pemungutan; penghargaan; ketentuan khusus; penyidikan; ketentuan sanksi; ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 26 Nopember 2010 dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2011. Ketentuan PBB-P2 paling lama 1 Januari 2014.
- Hal-hal yang belum diatur dalam qanun sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Pada saat qanun ini berlaku, maka semua Peraturan Daerah :
  1. Peraturan Daerah Kab. Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak hotel dan Restoran.
  2. Peraturan Daerah Kab. Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.
  3. Peraturan Daerah Kab. Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.
  4. Peraturan Daerah Kab. Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan bahan Galian Golongan C. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi